



REZIM SUKU BUNGA TINGGI DAN KEBIJAKAN MONETER PRO KEMISKINAN

POINT PENTING:

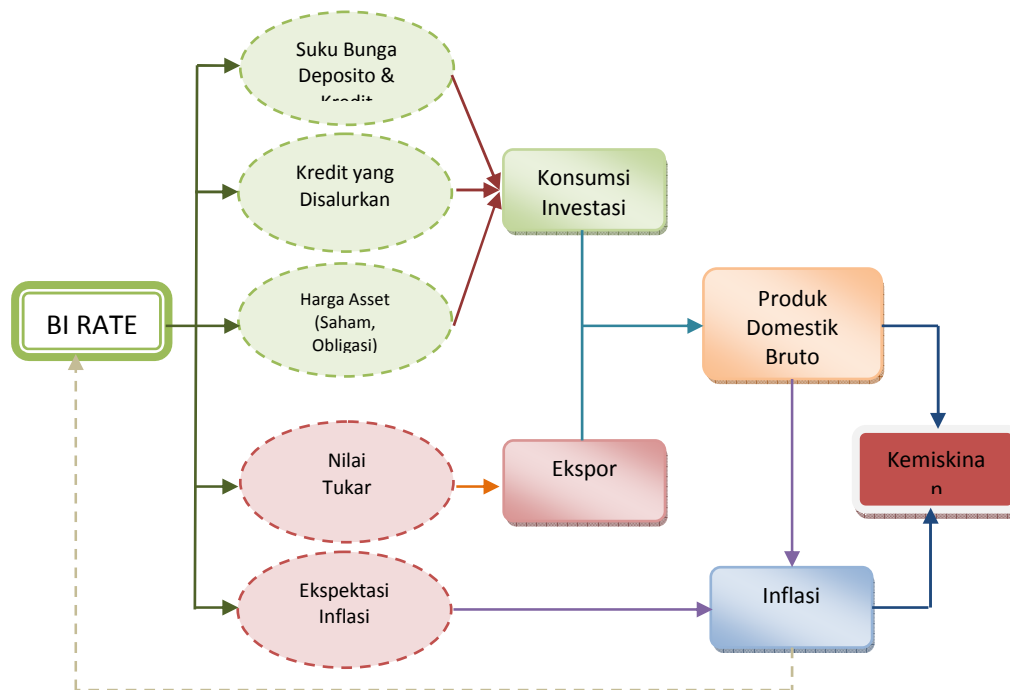
1. **Rezim suku bunga tinggi menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses sektor UMKM terhadap pembiayaan perbankan sedangkan sektor ini merupakan penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia.**
2. **Struktur pasar *oligopoly*, praktek kartel dan pengaruh kekuatan modal besar di dunia perbankan menyebabkan terjadinya kebijakan suku bunga tinggi.**
3. **Perlu upaya kebijakan moneter yang pro terhadap kemiskinan dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit bagi UMKM dan memperluas akses kredit terhadap UMKM, dan *financial inclusion* yang memperluas pelayanan perbankan bagi masyarakat kecil.**

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kemiskinan. Dengan menjaga kebijakan moneter maka akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kemiskinan¹. Di Indonesia saat ini, kebijakan moneter belum optimal mengatasi persoalan kemiskinan. Padahal, bila pemerintah mampu mengatur kebijakan moneter yang baik maka akan memberikan dampak terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan moneter yang berhubungan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan suku bunga.

Saat ini, suku bunga perbankan terlalu tinggi padahal suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) sudah berupaya diturunkan oleh Bank Indonesia. Dengan kerangka kebijakan moneter yang berpijak pada inflasi seharusnya dengan kondisi inflasi saat ini yang relative rendah dan terjaga, Bank Indonesia dapat secara bertahap menurunkan *BI Rate* dan mengontrol perbankan agar ikut menurunkan suku bunga pinjaman. Efek penurunan suku bunga akan mendorong akses masyarakat terhadap perbankan. Sehingga ekonomi akan tumbuh dengan baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan.

Rezim suku bunga tinggi berimplikasi rendahnya daya serap pembiayaan perbankan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal secara komposisi, sektor UMKM merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 80% sektor usaha dikuasai oleh UMKM. UMKM juga merupakan basis usaha bagi kelompok masyarakat miskin. Ketika akses UMKM ke perbankan lemah akibat suku bunga tinggi maka akan sulit untuk mendorong kesejahteraan bagi pelaku UMKM sehingga kemiskinan akan tetap sulit diatasi.

Gambar 1
 Kerangka Kebijakan Moneter, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan



SUKU BUNGA, INFLASI DAN KEMISKINAN

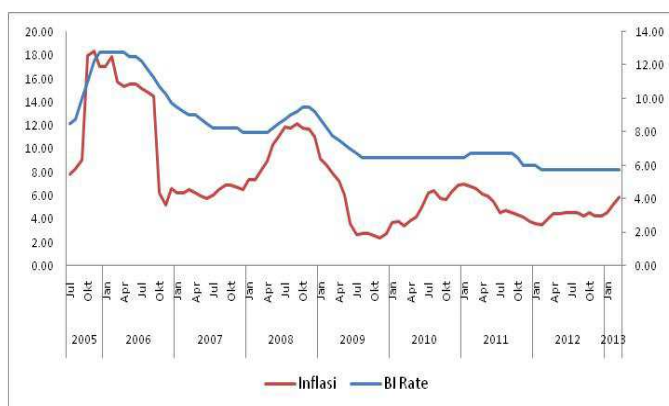
Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga kendali dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Sejak tahun 2005, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan moneter yang berorientasi pada pendekatan inflasi atau lebih dikenal dengan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Inflasi dalam kerangka kebijakan moneter merupakan jangkar nominal (*nominal anchor*) selain nilai tukar dan jumlah uang beredar. Fungsinya sebagai kendali dan sebagai penentu arah dari kebijakan moneter yang dilakukan. Bagi Bank Indonesia, inflasi ini merupakan dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan Suku Bunga (*BI Rate*) yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga perbankan.

Bagaimana kerangka hubungan kebijakan moneter dalam hal ini *BI Rate* terhadap kemiskinan. Gambar 1 dapat menjelaskan. *BI rate* akan memberikan dampak pada; suku bunga deposito dan kredit, jumlah kredit yang disalurkan, harga asset, nilai tukar dan ekspektasi inflasi.

Selanjutnya suku bunga deposito dan kredit, kredit yang disalurkan dan harga asset akan berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Sedangkan nilai tukar akan mempengaruhi ekspor. Konsumsi, investasi dan ekspor merupakan variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi (*product domestic bruto*). *Product domestic bruto* memberikan pengaruh terhadap inflasi. Dan secara bersamaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kemiskinan.

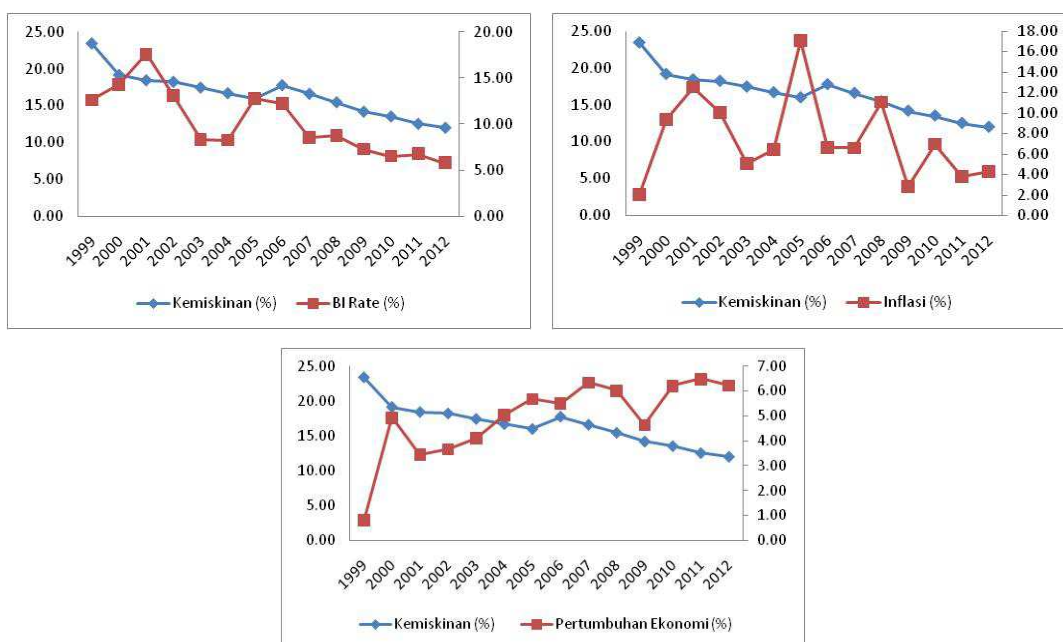
Inflasi memiliki hubungan positif dengan suku bunga. Ketika inflasi bergerak naik, *BI Rate* dan suku bunga pasar akan mengikuti pergerakan dari inflasi. Gambar 2 menunjukkan hubungan inflasi dengan *BI Rate*. Dimana trend *BI Rate* selalu mengikuti tren inflasi walaupun dalam beberapa kasus penurunan inflasi yang signifikan tidak diikuti oleh penurunan *BI Rate*, tapi tetap trennya tetap sejalan atau linear.

Gambar 2
Tren Perkembangan Inflasi dan BI Rate, Tahun 2005-2013



Sumber: Laporan Bank Indonesia

Gambar 3
Perkembangan BI Rate, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan



Sumber: Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Gambar 3 menunjukkan secara deskriptif hubungan antara indikator makro ekonomi; *BI Rate*, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. *BI Rate* dari gambar grafis belum memberikan kontribusi yang

optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal yang sama juga terlihat pada inflasi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi cukup besar memiliki kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Tabel 1

Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Kemiskinan
(Ordinary Least Square – Independent Variabel:
Angka Kemiskinan)

Variabel	Koefisien
Konstanta	18,044 (5,210)
BI Rate (X1)	0.417 (1,777)
Inflasi (X2)	-0,088 (-0,522)
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	-1,039 (-2,329)
R-Square	0,798

Keterangan: signifikan pada level 5%

Sumber : Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Secara ekonometrik juga menunjukkan lemahnya pengaruh *BI Rate* terhadap penurunan angka kemiskinan. Ini dapat dilihat pada table 1. Dengan model *Ordinary Least Square (OLS)*, dengan variable terikat angka kemiskinan dan variable bebas; *BI Rate*, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Sedangkan *BI Rate* dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan.

Ini dapat menjelaskan bahwa kebijakan moneter melalui mekanisme *BI Rate* belum memberikan dampak terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada satu persoalan krusial dalam melihat fenomena ini. Penurunan *BI Rate* ternyata tidak diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga pinjaman perbankan. Ini menjadikan akselerasi ekonomi menjadi rendah. Apalagi kebijakan suku bunga pinjaman tinggi ini akan berdampak pada rendahnya kemampuan sektor UMKM dalam menyerap pembiayaan perbankan. Satu sisi masyarakat miskin justru berada pada sektor UMKM dan sektor informal.

REZIM BUNGA TINGGI

Isu *financial inclusion* dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menarik dan perlu mendapatkan perhatian bagi dunia perbankan dan pemerintah di Indonesia. Di Indonesia akses masyarakat terhadap perbankan sangat rendah sekali, baru mencapai 30% sehingga strategi dalam *financial inclusion* merupakan hal yang penting dilakukan agar akselerasi ekonomi dapat berjalan dengan baik. *Financial inclusion* terutama diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat golongan lemah terhadap perbankan. Dan mengupayakan sektor usaha yang dikelola oleh kelompok kecil dan menengah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Aspek penting yang perlu di dorong adalah aspek pembiayaan perbankan bagi dunia usaha. Dibanding negara lain, pembiayaan perbankan di Indonesia sangat rendah. Selain itu ada kesenjangan antara level usaha seperti antara Usaha Besar (UB) dengan UMKM. Rendahnya pembiayaan tersebut disebabkan tingginya suku bunga pinjaman. Ini sebuah dilemma dan masalah klasik dalam dunia perbankan di Indonesia.

Suku bunga pinjaman yang tinggi akan mendorong peningkatan beban biaya bagi dunia usaha. Ketika beban bunga tersebut sangat besar dalam komponen input maka kalangan dunia usaha akan sulit mengaksesnya. Sedangkan bagi dunia usaha investasi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan ketika ekspansi usaha atau menjaga stabilitas usaha. Begitu juga bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha, kebutuhan akan sumber pembiayaan perbankan sangatlah besar. Tapi dengan kondisi tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi maka sangat sulit bagi pelaku usaha yang baru untuk mengaksesnya.

Tabel 2
Perkembangan BI Rate dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Tahun 2007-2012

KELOMPOK DAN JENIS SUKU BUNGA	TAHUN					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Suku Bunga Bank Indonesia (SBI)	8.00	9.25	6.50	6.50	6.00	5.75
Bank Persero						
Modal Kerja	13.47	14.61	13.83	13.06	12.37	12.00
Investasi	12.93	13.85	12.56	10.81	10.39	9.98
Konsumsi	14.03	13.84	13.88	13.05	12.91	12.72
Bank Pemerintah Daerah						
Modal Kerja	15.33	14.43	13.91	13.57	13.52	13.63
Investasi	14.61	13.52	12.54	12.44	12.40	12.33
Konsumsi	13.82	14.06	14.17	14.10	13.91	13.99
Bank Swasta Nasional						
Modal Kerja	12.96	15.90	14.09	13.02	12.34	12.02
Investasi	13.11	14.85	13.51	13.20	12.64	12.23
Konsumsi	14.69	15.91	16.22	14.05	13.11	13.17
Bank Asing dan Campuran						
Modal Kerja	10.23	14.58	11.73	10.23	8.71	7.98
Investasi	10.56	15.00	12.22	11.82	14.89	9.54
Konsumsi	36.24	35.32	35.59	31.66	30.73	30.66
Bank Umum						
Modal Kerja	13.00	15.22	13.69	12.83	12.16	11.79
Investasi	13.01	14.40	12.96	12.28	12.04	11.46
Konsumsi	16.13	16.40	16.42	14.53	14.15	13.90

Sumber: Laporan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan seharusnya memberi tekanan terhadap perbankan agar menurunkan tingkat suku bunga pinjaman². Bila dilihat dari table 2, menunjukkan bahwa terjadi gap yang cukup besar antara BI Rate dengan suku bunga pinjaman. Hampir semua perbankan baik bank persero, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing/campuran dan bank umum menetapkan tingkat suku bunga jauh diatas *BI Rate*. Kecenderungan suku bunga tinggi ini karena dalam dunia perbankan di Indonesia ada indikasi struktur pasar yang bersifat *oligopoly* dan kecenderungan terjadinya kartel. *Oligopoly* yang berindikasi kartel menjadikan pelaku usaha perbankan terutama kelompok bank berskala besar dapat mengontrol tingkat suku bunga tanpa berpedoman pada *BI Rate*.

Pelemahan ekonomi secara global akan terus terjadi. Di Indonesia imbasnya akan semakin terasa. Tahun 2012 sampai saat ini neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ini menunjukkan bahwa krisis masih terus berlangsung dan perekonomian Indonesia mulai mengalami guncangan. Pada kondisi tersebut pemerintah perlu melakukan antisipasi melalui kebijakan moneter. Seperti yang dilakukan beberapa negara maju yang melakukan kebijakan moneter ekstra akomodatif melalui instrument suku bunga rendah agar likuiditas mengalami peningkatan sehingga dapat menopang perekonomian.

Bila dunia perbankan tetap bertahan dengan strategi bunga tinggi dan defisit anggaran terus membesar maka akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan kondisi tersebut sudah mulai terasa saat ini. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diprediksi akan lebih rendah dibanding tahun 2012. Implikasinya jelas akan mempengaruhi kemiskinan.

KAPITALISME DAN TEKANAN BAGI KEBIJAKAN SUKU BUNGA TINGGI

Kebijakan suku bunga tinggi sebenarnya telah menuai protes dari beberapa kalangan. Perdebatan yang menarik tersebut terjadi pada tahun 1990an ketika Habibie memprotes keras kebijakan suku bunga tinggi. Habibie menganggap bahwa dengan kebijakan suku bunga tinggi akan menekan pengembangan sektor industri yang saat itu sangat intensif dilakukan oleh Habibie. Akan sulit mencapai target industrialisasi ketika bunga untuk pembiayaan industri sangat tinggi. Tapi kalangan yang setuju terhadap kebijakan ini menyebutkan bahwa suku bunga tinggi akan mendorong masuknya arus modal ke dalam negeri atau *capital inflow* yang nanti akan memperkuat sektor usaha dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi³. Awalnya memang terjadi apa yang diprediksi oleh kalangan yang pro kebijakan suku bunga tinggi. Tapi ketika *Asian Financial Crisis* yang menghantam Indonesia ternyata disebabkan oleh kerapuhan sektor financial di Indonesia, salah satunya regulasi bunga tinggi. Tatanan perbankan yang rapuh tersebutlah yang menyebabkan porak porandanya sistem ekonomi Indonesia yang menyebabkan hantaman krisis yang cukup besar.

Sebenarnya belajar dari *Asian Financial Crisis*, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan suku bunga tinggi. Apalagi sebenarnya Bank Indonesia sudah menekan *BI Rate*. Tapi pihak perbankan belum menurunkan tingkat suku bunga terutama suku bunga pinjaman. Ada beberapa aspek yang perlu dicermati. Pertama, suku bunga tinggi disebabkan adanya praktek kartel dalam usaha perbankan di Indonesia. Sebenarnya implikasi kartel usaha di perbankan sudah dirasakan tapi sulit untuk membuktikan dalam konteks ilmiah. Implikasinya terlihat dari struktur pasar yang bersifat *oligopoly*. Dimana empat bank besar menguasai lebih lima puluh persen pangsa pasar. Kedua, struktur dana pihak ketiga yang mengalami ketimpangan. Jika dilihat table 3, 97.6% jumlah rekening berada di nasabah dengan nominal simpanan \leq Rp. 100 juta sedangkan total nominal tabungan hanya 15,6%. Bandingkan dengan jumlah rekening dengan simpanan nominal $>$ Rp. 5 milyar yang hanya 0.1% dari total rekening nasabah di Indonesia tapi jumlah nominalnya mencapai 43.4%. Dua aspek ini yang disebut dengan kapitalisme perbankan.

Tabel 3

Jumlah Rekening dan Nominal Simpanan menurut Kelompok di Indonesia, Mei 2013

NOMINAL SIMPANAN	REKING		NOMINAL	
	JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH (Rp. MILYAR)	PERSENTASE
\leq 100 Jt	120,136,003	97.6	506,411.12	15.6
100 Jt - 200 Jt	1,320,882	1.1	185,927.78	5.7
200 Jt - 500 Jt	913,413	0.7	288,105.43	8.9
500 Jt - 1 M	367,485	0.3	272,974.58	8.4
1 M - 2 M	202,350	0.2	260,600.94	8.1
2 M - 5 M	97,704	0.1	319,510.82	9.9
$>$ 5 M	63,225	0.1	1,404,713.55	43.4
TOTAL	123,101,062	100.0	3,238,244.22	100.0

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kapitalisme perbankan menunjukkan besarnya pengaruh kekuatan modal dalam menentukan tingkat suku bunga. Empat bank besar akan berkuasa menentukan tingkat suku bunga sendiri karena penguasaan yang besar dalam pasar. Nasabah besar dengan simpanan yang besar berupaya mendorong perbankan untuk menetapkan suku bunga tinggi, Biasanya praktek dilapangan, perbankan dalam memberikan bunga simpanan bagi nasabah besar akan meninggikan suku bunga dan merendahkan suku bunga untuk kredit. Kondisi terbalik ketika berhadapan dengan nasabah kecil. Perbankan akan menetapkan bunga rendah untuk simpanan dan bunga tinggi untuk kredit.

Upaya perbaikan terhadap kebijakan perbankan dengan suku bunga tinggi ini perlu dilakukan agar dunia usaha (sektor riil) dapat bergerak. Minimnya likuiditas yang akan dirasakan di sektor riil dalam beberapa tahun ke depan akibat imbas dari *Global Economic Crisis* memerlukan langkah komprehensif dari dunia perbankan dalam meningkatkan kredit ke masyarakat. Walaupun kebijakan ini harus hati-hati dilakukan agar perbankan juga tidak kesulitan likuiditas akibat penurunan dana pihak ketiga yang akan keluar ketika suku bunga simpanan tidak lagi kompetitif. Tapi mendorong likuiditas di sektor riil merupakan target yang harus segera dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.

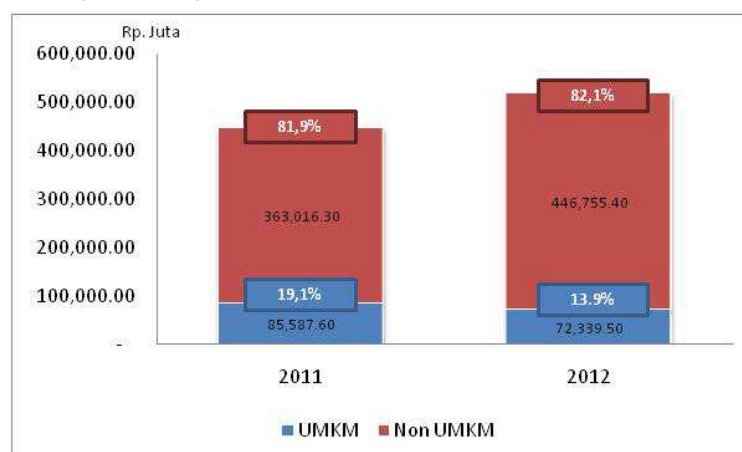
AKSELERASI PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI UMKM

Sektor UMKM merupakan sektor dimana kelompok masyarakat miskin berada terutama pada usaha mikro. Memperkuat basis permodalan bagi UMKM merupakan upaya strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Selama ini, persoalan kemiskinan di Indonesia adalah ketidakmampuan kelompok miskin terutama yang berusaha di sektor informal dalam hal permodalan. Untuk itu intermediasi perbankan terhadap UMKM harus diperkuat agar simpul-simpul kemiskinan bisa terurai.

Tapi dari akses UMKM terhadap kredit perbankan di Indonesia sangat timpang dibandingkan kredit non UMKM (usaha skala besar). Komposisi kredit UMKM baru sekitar 13.9% dari total penyaluran kredit di Indonesia. Padahal dari aspek usaha, sekitar 80% dunia usaha di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Ini memberikan implikasi bahwa keberpihakan bank terhadap sektor UMKM belumlah besar.

Gambar 3

Ekspansi Penyaluran Kredit di Indonesia, Tahun 2011-2012



Sumber: Laporan Bank Indonesia (diolah)

Dari data pada table 4 mengenai penyaluran kredit di sektor UMKM. Persoalan akan jelas terlihat bila kita analisis komposisi kredit perbankan terhadap UMKM menurut sektor. Sekitar 48% kredit di sektor UMKM berada di sektor perdagangan dan hanya 7.7% berada di sektor pertanian. Ini menarik untuk dianalisis dalam kerangka strategi perbankan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Saat ini, sekitar 48% penduduk miskin di Indonesia berada di sektor pertanian. Sehingga upaya mendorong intermediasi perbankan ke sektor pertanian merupakan strategi yang paling baik terhadap pengentasan kemiskinan.

Selama ini perbankan belum memberikan perlakuan yang baik terhadap pelaku usaha di

sektor pertanian. Bila dihadapi dengan pilihan antara menyalurkan kredit ke sektor perdagangan dengan sektor pertanian, perbankan lebih memilih pangsa pasar sektor perdagangan. Pihak perbankan berpandangan pada kasus tingginya kredit macet di pertanian tempo dulu melalui program Kredit Usaha Tani (KUT). Pemikiran ini harus dibenarkan lagi. Pemerintah sudah mengambil kebijakan pemutihan terhadap kredit macet di KUT. Dan ada perisai kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberi jaminan. Seharusnya dunia perbankan bisa lebih leluasa menyalurkan kredit bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

Tabel 4
Penyaluran Kredit di Sektor UMKM, Tahun 2011-2012

KETERANGAN	NILAI (Rp. Juta)		KONTRIBUSI (%)		PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2011	2012	
LAPANGAN USAHA					
• Pertanian	270,082.62	447,026.80	5.4	7.7	65.5
• Pertambangan dan Penggalian	42,550.32	56,185.75	0.9	1.0	32.0
• Industri Pengolahan	562,806.90	639,015.38	11.3	11.0	13.5
• Listrik, Gas dan Air Bersih	13,746.10	18,817.74	0.3	0.3	36.9
• Konstruksi	266,616.03	330,716.50	5.4	5.7	24.0
• Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,246,888.22	2,800,425.57	45.3	48.1	24.6
• Pengangkutan dan Komunikasi	186,561.40	216,635.49	3.8	3.7	16.1
• Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	351,682.67	422,927.49	7.1	7.3	20.3
• Jasa-jasa	1,021,749.31	887,094.79	20.6	15.2	-13.2
• Tidak Teridentifikasi	205.09	23.34	0.0	0.0	-88.6
JENIS PENGGUNAAN					
• Modal Kerja	3,876,237.98	4,469,780.63	78.1	76.8	15.3
• Invetastasi	1,086,461.21	1,349,062.83	21.9	23.2	24.2
• Tidak Teridentifikasi	189.45	25.39	0.0	0.0	-86.6
SKALA USAHA					
• Mikro	983,902.41	1,125,976.24	19.8	19.4	14.4
• Kecil	1,711,847.34	1,856,101.80	34.5	31.9	8.4
• Menengah	2,267,137.08	2,836,790.81	45.7	48.8	25.1
KREDIT DENGAN PENJAMIN TERNTENTU					
• Mikro	127,315.21	176,571.95	46.3	42.7	38.7
• Kecil	135,961.92	212,809.46	49.5	51.5	56.5
• Menengah	11,452.87	23,776.02	4.2	5.8	107.6

Sumber: Laporan Bank Indonesia

Hal yang sama juga terjadi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Walaupun terjadi pertumbuhan yang signifikan terhadap KUR tapi efektivitasnya terhadap penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. Bila dilihat pada praktek

dilapangan, banyak perbankan yang justru menyalurkan KUR pada bukan target program. Ini menyebabkan banyak kemelencengan dari sasaran program KUR yang tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan.

REKOMENDASI

Dalam konteks menciptakan kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter yang pro terhadap penanggulangan kemiskinan diperlukan kebijakan sebagai berikut:

A. Bank Indonesia harus segera melakukan kebijakan moneter akomodatif melalui kebijakan suku bunga rendah.

Krisis global masih akan dirasakan oleh Indonesia, malahan rambatannya (*spillover*) semakin kuat dirasakan. Buktinya neraca pembayaran terus mengalami defisit. Kondisi fiskal juga tidak kuat sehingga kebijakan moneter akomodatif perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh negara maju saat ini. Tujuannya agar likuiditas dapat dijaga sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kemiskinan.

B. Kebijakan financial inclusion dengan mendorong intermediasi perbankan pada kelompok UMKM dan masyarakat miskin.

Saat ini akses UMKM dan masyarakat miskin masih sangat rendah terhadap perbankan. Pelaku usaha perbankan juga masih memarginalkan kelompok ini. Perbankan cenderung berupaya pada peningkatan profit tanpa berorientasi pada pemerataan akses yang cenderung meningkatkan biaya operasional. Disinilah peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mendorong perbankan untuk menyediakan layanan-layanan produk perbankan yang pro pada UMKM dan masyarakat miskin.

C. Perlu ada regulasi agar dunia perbankan menurunkan tingkat suku bunga kredit.

Bank Indonesia dan OJK perlu tegas untuk menciptakan aturan bagi penentuan suku bunga kredit. Ini titik poin dalam upaya mendorong investasi di Indonesia. Terjadinya praktek oligopoli yang mengarah pada kartel usaha merupakan penyebab terjadinya tingkat suku bunga tinggi. Ini merupakan tugas OJK nantinya dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan.

D. Mendorong penguatan kredit di sektor pertanian terutama pada kelompok usaha mikro pertanian.

Kantong-kantong kemiskinan berada di sektor pertanian. Kesulitan petani berada pada persoalan permodalan. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat aturan mengenai KUR agar distribusinya jatuh pada kelompok petani. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan solusi dalam rangka mengatasi rendahnya akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan.

Policy brief ini ditulis oleh **Setyo Budiantoro**, *Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa* dan **Wiko Saputra**, *Economic Policy Officer Perkumpulan Prakarsa*.

Kantor Prakarsa: Jl. Rawa Bambu 1 Blok A No.8E
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Telpon
(021)7811798.

Endnotes

¹ UNDP & International Poverty Centre (2006). Monetary Policy and Financial Sector Reform for Employment Creation and Poverty Reduction in Ghana. Country Study No. 2 (2006). Epstein, Gerald (2009). Rethinking Monetary and Financial Policy: Practical Suggestions for Monitoring Financial Stability while Generating Employment and Poverty Reduction. Employment Working Paper No. 37 (2009). Geneva: ILO.

²Ke depan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini masih dalam masa transisi.

³Lihat Rahrdjo, Dawam (2012). Pembangunan Post Modernis: Esai-esai Ekonomi Politik. Insist.